

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahunan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Palu berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 telah dilakukan dengan pembahasan rancangan awal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu yang ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan tentang Persetujuan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pertimbangan sebagai berikut :

1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah

Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan nomenklatur perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD	Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD
1	Dinas Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
4	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Dinas Sosial dan PM	Dinas Sosial
6	BKD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Palu, Tahun 2018

2. Penyesuaian Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi terhadap pendapatan daerah Kota Palu Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Evaluasi Pendapatan Tahun 2016-2021

Tahun	Proyeksi dalam RPJMD	Realisasi/Proyeksi	Deviasi
2016	1.430.046.760.971	1.444.152.214.772,63	0,99%
2017	1.660.515.499.642	1.340.906.455.717,20	-19,25%
2018	1.890.532.675.067	1.311.034.004.626,00	-30,65%
2019	2.171.870.463.530	1.342.070.129.259,12*	
2020	2.478.683.872.987	1.365.204.087.574,75*	
2021	2.757.139.020.504	1.391.772.235.730,51*	
		Rata-rata	-16,30%

* : Proyeksi pendapatan perubahan RPJMD

Sumber : Bappeda Kota Palu, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan deviasi yang begitu jauh. Proyeksi dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, masing-masing sebesar 0,99 % pada Tahun 2016, -19,25% pada Tahun 2017, dan -30,65% pada Tahun 2018. Rata-rata deviasi selama 3 tahun dari Tahun 2016-2018 sebesar -16,30%. Data evaluasi pada tabel di atas menunjukkan penetapan proyeksi pendapatan Tahun 2019-2021 tidak rasional dan realistis untuk dicapai, sehingga perlu penyesuaian dengan data realisasi/proyeksi.

3. Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan serta Program

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program yang tercantum pada RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menunjukkan beberapa indikator sasaran belum *Specific* (spesifik), *Measureable* (Terukur), *Attainable* (Dapat dicapai), *Result Oriented* (Orientasi Tujuan), *Time Bound* (Batasan Waktu), dan *Continuos Improve* (Perbaikan Berkelanjutan). Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengukur kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kota Palu.

4. Perubahan Sistematika Penyusunan RPJMD

Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menyesuaikan dengan sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan RPJMD dari semula sebanyak 10 bab menjadi 9 bab.

1.2. Gambaran Umum Kota Palu

1.2.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%).

Tabel 1.3
Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
Kota Palu		395,06	100,00

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Luas wilayah Kota Palu menurut kecamatan diuraikan dalam tabel 2.1, sementara jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Pusat Kota Palu diuraikan dalam tabel 2.2.

Tabel 1.4
Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2016

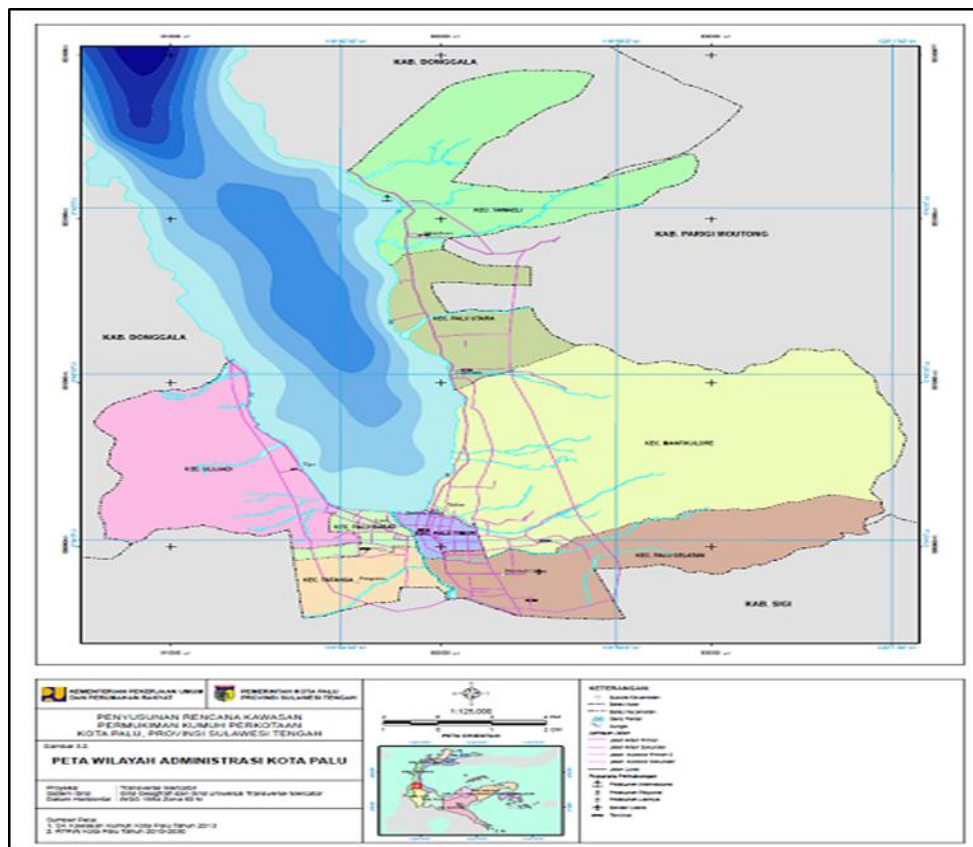
No.	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Ibu Kota	Jarak Melalui Darat (KM)
1.	Palu Barat	6	Lere	4
2.	Tatanga	6	Pengawu	6
3.	Ulujadi	6	Tipo	9
4.	Palu Selatan	5	Birobuli Utara	2
5.	Palu Timur	5	Besusu Barat	3
6.	Mantikulore	8	Talise	3
7.	Palu Utara	5	Mamboro	10
8.	Tawaeli	5	Lambara	17
Jumlah		46	-	-

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Berdasarkan uraian pada tabel 2.2 kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Mantikulore dengan jumlah kelurahan sebanyak 8 (Delapan) kelurahan, sementara jarak terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tawaeli dengan jarak 17 Km.

1.2.2. Letak, Kondisi Geografis

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran Lembah Palu dan Teluk Palu, secara astronomis terletak antara 0°,36" - 0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" - 121°,1" Bujur Timur. Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber: Rencana Kawasan Pemukiman Tahun 2016

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Kota Palu berada di sekitar Garis Khatulistiwa terdiri dari 46 (empat puluh enam) kelurahan. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran Lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu. Letak kecamatan Kota Palu menurut posisi pantai diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 1.5
Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu Tahun 2016

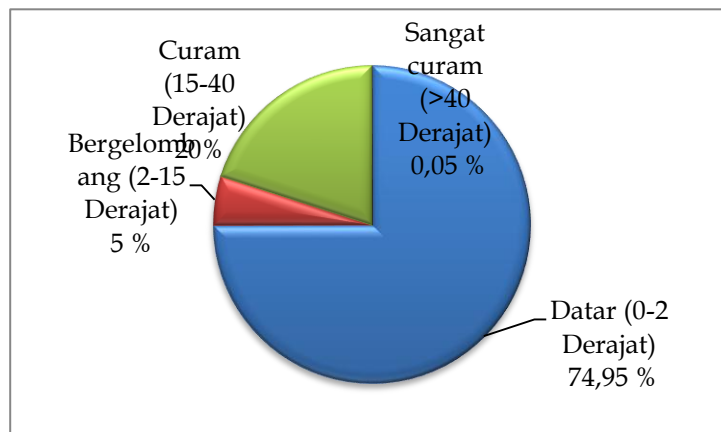
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Palu Barat	6	1	5
2	Tatanga	6	-	6
3	Ulujadi	6	4	2
4	Palu Selatan	5	-	5
5	Palu Timur	5	1	4
6	Mantikulore	8	3	5
7	Palu Utara	5	4	1
8	Tawaeli	5	4	1
Kota Palu		46	17	29

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan seluruhnya berada di wilayah bukan pantai. Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli hampir semuanya berada pada pesisir pantai, dimana terdapat 4 (empat) kelurahan yang berada pada pesisir pantai dan hanya terdapat 1 (satu) kelurahan yang berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

1.2.3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Palu adalah datar sampai bergelombang dengan beberapa daerah yang berlembah. Karakteristik kondisi topografi wilayah Kota Palu ditunjukkan dalam Gambar 1.2 dan tabel 1.6. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Palu memiliki permukaan yang datar dengan persentase 75 % dari total luas wilayah. Wilayah yang memiliki permukaan bergelombang dengan kemiringan diantara 2-15 derajat sebesar 5%. Wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40 derajat seluas 20 %. Terdapat 0,05% wilayah dengan kemiringan > 40 derajat. Wilayah dengan kemiringan di atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Gambar 1.2
Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu

Tabel 1.6
Ketinggian Kelurahan dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ketinggian dari Permukaan Laut (M)		
			<500	500 – 700	700+
1	Palu Barat	6	6	-	-
2	Tatanga	6	6	-	-
3	Ulujadi	6	6	-	-
4	Palu Selatan	5	4	1	-
5	Palu Timur	5	5	-	-
6	Mantikulore	8	7	1	-
7	Palu Utara	5	5	-	-
8	Tawaeli	5	5	-	-
Kota Palu		46	44	2	-

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bahwa terdapat 44 (empat puluh empat) kelurahan di Kota Palu yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Kelurahan yang memiliki ketinggian antara 500 – 700 meter dari permukaan laut sebanyak 2 (dua) kelurahan dan tidak terdapat kelurahan yang berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut.

1.2.4. Kondisi Geologi

Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu ini yang dilaporkan SPRS menunjukkan bahwa formasi geologinya terdiri dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku (*Inncous Intrusiverocks*). Disamping pula batuan-batuan metamorfosis dan sedimen.

Dataran Lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Geologi tanah dataran Lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang.

1.2.5. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Kota Palu merupakan wilayah yang memiliki karekteristik yang spesifik, sehingga berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai dua musim. Kota Palu tidak dapat digolongkan sebagai daerah musim atau disebut sebagai Non Zona Musim.

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.5 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada diwilayah Kota Palu.

Tabel 1.7
Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungai Tawaeli

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2016

Kota Palu memiliki karakter klimatologi yang spesifik karena Kota Palu tidak dapat digolongkan daerah musim atau biasa disebut Non Zona Musim. Kondisi iklim Kota Palu dari tahun ketahun selama 5 tahun terakhir cukup stabil, namun pada Tahun 2016 sedikit mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan yang cukup besar terjadi pada perubahan curah hujan. Curah hujan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari rata-rata 71,8 mm pada Tahun 2011 menjadi rata-rata 41,06 pada Tahun 2015. Berikut ini gambaran keadaan iklim rata-rata Kota Palu menurut suhu, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin.

Tabel 1.8
Keadaan Iklim Rata-Rata Kota Palu Tahun 2011-2015

Rata-rata	2011	2012	2013	2014	2015
Suhu Udara (°C)	27,60	27,70	27,70	27,28	28,37
Tekanan Udara (mb)	1.009,9	1.010,3	1.010,2	1.011,1,	1.011,7
Kelembapan Udara (%)	76,10	76,00	76,40	77,88	72,51
Penyinaran Matahari (%)	54,50	62,90	57,70	63,06	73,43
Curah Hujan (mm)	71,98	63,38	62,33	58,76	41,06
Kecepatan Angin (knots)	3,00	3,80	3,60	3,83	4,53
Arah Angin Terbanyak	Utara	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut

Sumber: Stasiun Udara Mutiara Palu

Suhu udara di Kota Palu selama lima tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan, dari rata-rata 27,6°C Pada Tahun 2011 menjadi 28,37°C pada Tahun 2015. Kelembaban udara mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2011 rata-rata 76,1% menjadi 72,51% pada Tahun 2015. Kecepatan angin terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2011 rata-rata 3,00 knots menjadi 4,53 knots pada Tahun 2015. Arah angin di Kota Palu selama lima tahun terakhir umumnya bertiup dari arah Barat Laut kecuali pada Tahun 2011 angin bertiup umumnya dari arah Utara.

1.3. Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun susunan Organisasi Pemerintah Kota Palu terdiri dari:

1. Walikota dan Wakil Walikota Palu;
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD;
4. Inspektorat Daerah;
5. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 10. Dinas Pemuda dan Olah raga;
 11. Dinas Pendidikan;
 12. Dinas Pekerjaan Umum;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
 15. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 16. Dinas Lingkungan Hidup;
 17. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
 18. Dinas Informatika dan Statistik;
 19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja;
 21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
6. Badan Daerah terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura ;
 7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4. Permasalahan Umum dan Isu Strategis Pemerintah Kota Palu

1.4.1. Permasalahan Umum

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan di Kota Palu, sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

a. Pendidikan

- Mutu hasil ujian nasional rendah.
- Masih terdapat anak putus sekolah.

b. Kesehatan

- Angka harapan hidup Kota Palu mengalami penurunan.
- Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang masih rendah.
- Kecukupan sarana kesehatan Puskesmas dan Pustu belum sesuai standar.
- Kurangnya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
- Rendahnya akses sanitasi yang layak.

c. Pekerjaan Umum

- Kebutuhan dan kelayakan air bersih belum mencukupi dan memenuhi syarat.
- Banjir dan air yang tergenang di jalan karena tidak adanya saluran di sisi jalan mengarah ke bawah trotoar yang berlanjut ke drainase sekunder
- Sarana sosial dan hiburan masyarakat masih kurang dan tidak dikelola dengan baik.

d. Penataan Ruang dan Pertanahan

- Pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu.
- Ketidakjelasan peruntukkan ruang di Kota Palu menurut kelurahan.
- Masih banyak rumah tidak layak huni di pinggiran Kota Palu.
- Belum optimalnya pendataan pertanahan.

2. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu sebagai berikut:

a. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang.
- Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah.
- Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- Masih kurangnya sampah yang dikelola oleh masyarakat.
- Kurangnya penghijauan di setiap pinggir jalan.
- Belum terzonafikasi pengelolaan sampah dengan baik.
- Belum ditanganinya secara baik limbah industri, manusia, dan hewan.
- Belum optimalnya pengelolaan hutan kota.

b. Perhubungan

- Belum optimalnya pelaksanaan trayek angkutan umum dalam kota.
- Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang.

c. Informatika

- Belum semua akses informasi tersedia secara realtime.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam mencapai Good Governance.
- Masih kurangnya sumber daya manusia bidang teknologi informasi komunikasi yang handal dan profesional.

d. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum berkembangnya industri kreatif berbasis sumberdaya lokal.
- Masih terdapat koperasi tidak aktif
- Belum adanya data dasar UMKM.

e. Statistik

- Belum terintegrasinya data seluruh OPD.
- Belum optimalnya sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pendataan.
- Kurangnya komitmen pemilik data dalam upaya mengintegrasikan data sektoral.
- Sumberdaya aparatur pengelola data masih sangat kurang.

3. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu di antaranya teridentifikasi sebagai berikut :

a. Kebudayaan dan Pariwisata

- Kurang tersedianya prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata unggulan.
- Belum terkoordinasi dengan baik pembangunan objek wisata dengan lembaga dunia usaha.
- Belum adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kota Palu.
- Belum optimalnya peran organisasi, birokrasi, swasta, profesi, dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- Kurangnya sumber daya manusia pariwisata.
- Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
- Tidak terorganisirnya event seni, budaya dan pariwisata daerah.
- Belum dikembangkan ekonomi kreatif seni dan budaya.
- Belum tersedianya informasi sumber daya budaya yang akurat, terpercaya dan dapat diakses secara mudah dan cepat.
- Pengelolaan situs cagar budaya Kota Palu masih kurang.
- Belum optimalnya pembinaan pada sanggar seni.
- Mulai hilangnya nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kota.
- Tidak berjalannya adat budaya yang berlaku di dalam masyarakat.

b. Pertanian

- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.
- Menurunnya produktivitas dan mutu hasil pertanian seperti tanaman padi, kelapa dalam dan ternak.

c. Perdagangan dan Perindustrian

- Kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian semakin menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
- Belum tumbuhnya investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan penunjang pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah berkaitan urusan penunjang pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut :

a. Perencanaan

- Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat.

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan Musrenbang.
- Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam Musrenbang.
- Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan.
- Kurangnya pemahaman dalam mensinkronkan perencanaan Oragnisasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

b. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

- Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
- Masih relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan aparatur daerah.

1.4.2. Isu Strategis Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan permasalahan umum Pemerintah Kota Palu sesuai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dapat diuraikan beberapa isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Daerah
2. Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau
3. Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
4. Kemiskinan Kota
5. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan
6. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah
7. Pengembangan Sistem Transportasi Umum
8. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Pemukiman Kota
10. Pembangunan Berbudaya Dan Beradat

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016 – 2021. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
1	2	3	
1	Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	
2	Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu	Jumlah dokumen data potensi SDM Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	
3	Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD SMP
		Angka Melek huruf	
4	Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama	
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni	
		Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka usia harapan hidup	
		Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas	
		Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	
		Prevalensi balita gizi buruk	
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	
6	1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi.	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri	
		Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	
8	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	
		Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD	
9	Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	
10	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	
		Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	

No	Sasaran	Indikator Kinerja
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota
11	Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah
12	Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif	Persentase sampah yang terangkut
		Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif	Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan
14	Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik
		Panjang jalan yang terbangun (meter)
		Panjang drainase yang terbangun (meter)
		Persentase drainase kota dalam kondisi baik
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik
		Akses Sanitasi layak
		Cakupan layanan pengguna air bersih
		Persentase kawasan kumuh yang tertata
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial	Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)
		Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial	Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, maka sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 sebagai berikut :

- Misi 1 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja
- Misi 2 terdapat 3 (tiga) sasaran, dan 11 (sebelas) indikator kinerja
- Misi 3 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja
- Misi 4 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja
- Misi 5 terdapat 5 (lima) sasaran, dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja
- Misi 6 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2017, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu
Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS	1
2	Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu	Jumlah dokumen data potensi SDM	3 Dok
		Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	4 Dok
3	Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD SMP
			0,35 % 0,32 %
		Angka Melek huruf	99,81 %
4	Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama	100 %
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni	100 %
		Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	100 %
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka usia harapan hidup	70,68 tahun
		Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Baik
		Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit :	Baik
		Prevalensi balita gizi buruk	0,66
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,30

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi.	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri	22 Klpk
7	Terwujudnya pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	102
8	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	10 OPD
		Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD	6 OPD
9	Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	65%
10	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	6 Trayek
		Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	82,59%
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota	50%
11	Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	1
12	Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro	4
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif	Persentase sampah yang terangkut	60%
		Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	15 ton
		Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	15%
14	Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	51,54%
		Panjang jalan yang terbangun (meter)	234.784
		Panjang drainase yang terbangun (meter)	42.104
		Persentase drainase kota dalam kondisi baik	43,86%
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%
		Akses Sanitasi layak	61,14%
		Cakupan layanan pengguna air bersih	79,27%
		Persentase kawasan kumuh yang tertata	17,61%
Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)	5 lokasi		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial	Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	46
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	2
		Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	17

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017.

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2017 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2017		Rumus
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1	Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS		1	1	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS
2	Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu	Jumlah dokumen data potensi SDM		3 Dok	3 Dok	Jumlah dokumen data potensi SDM
		Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS		4 Dok	4 Dok	Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS
3	Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar	SD	0,35 %	0,04	Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-Kota Palu dibagi Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kota Palu dikali 100 %
			SMP	0,32 %	0,01	Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se-Kota Palu dibagi jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kota Palu dikali 100 %
		Angka Melek huruf		99,81 %	99,83 %	Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun 2017 dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100
4	Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama		100 %	100 %	Jumlah siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama dibagi jumlah siswa kelas 5 se-Kota Palu dikali 100%
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni		100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni dibagi jumlah Sekolah Menengah Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Rumus
			Target	Realisasi	
		Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	100 %	100 %	Jumlah sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya dibagi jumlah sekolah pendidikan dasar dikali 100%
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka usia harapan hidup	70,68 tahun	69,93 tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
		Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Baik	Baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25
		Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Baik	Baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25
		Prevalensi balita gizi buruk	0,66	0,153	(Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi) / (Jumlah Balita ditimbang) * 100
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%	100%	(Jumlah KLB yang ditangani) / (Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama) * 100
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,30	100%	(Jumlah Kelurahan siaga yang aktif) dibagi (jumlah Kelurahan siaga) * 100
6	1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi.	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri	22 Klpk	22 Klpk	Jumlah data kelompok IKM
7	Terwujudnya pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	102	102	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri
8	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	10 OPD	10 OPD	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD
		Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD	6 OPD	6 OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik terhadap layanan OPD
9	Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	65%	65%	Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD dikali 100 %
10	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	6 Trayek	6 Trayek	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan
		Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	82,59%	82,77%	Jumlah lokasi lahan parkir yang layak dibagi jumlah lahan parkir kota dikali 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Rumus
			Target	Realisasi	
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota	50%	50%	Jumlah terminal kota yang terkelola dibagi jumlah terminal kota
11	Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	1	1	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah
12	Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro	4	4	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif	Persentase sampah yang terangkut	60%	60%	Jumlah sampah yang terangkut dibagi jumlah sampah yang ada dikali 100 %
		Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	15 ton	15 ton	Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat
		Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	15%	15%	Jumlah kelurahan yang menjaga kebersihan lingkungan dibagi jumlah kelurahan Kota Palu dikali 100 %
14	Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	51,54%	59,60%	Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan Kota Palu dikali 100 %
		Panjang jalan yang terbangun (meter)	234.784	303.406	Panjang jalan yang terbangun (meter)
		Panjang drainase yang terbangun (meter)	42.104	42.476	panjang drainase yang terbangun (meter)
		Persentase drainase kota dalam kondisi baik	43,86%	48,77%	Panjang drainase terbangun dalam kondisi baik dibagi panjang drainase Kota Palu yang mesti terbangun dikali 100%
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan yang terbangun dikali 100%
		Akses sanitasi layak	61,14%	61,14%	Akses sanitasi layak
		Cakupan layanan pengguna air bersih	79,27%	81,55%	Jumlah layanan pengguna air bersih dibagi jumlah penduduk dikali 100 %
		Persentase kawasan kumuh yang tertata	17,61%	17,61%	Jumlah kawasan kumuh yang tertata dibagi jumlah kawasan kumuh di Kota Palu
		Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)	5 lokasi	5 lokasi	Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Rumus
			Target	Realisasi	
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial	Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	46	46	Jumlah lembaga adat yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga adat Kota Palu
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	2	2	Jumlah lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga keagamaan Kota Palu
		Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	17	17	Jumlah lembaga seni yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga seni Kota Palu

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Skala nilai (%)	Kesimpulan evaluasi
1	85 – 100	Sangat Berhasil
2	70 – 85	Berhasil
3	55 – 70	Cukup Berhasil
4	< 55	Tidak Berhasil

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Interval (%)			
			Target	Realisasi	<55	55-70	70-85	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	1	1				√
2	Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu	Jumlah dokumen data potensi SDM	3 Dok	3 Dok				√
		Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	4 Dok	4 Dok				√
3	Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD	0,35 %	0,04			√
			SMP	0,32 %	0,01			√
		Angka Melek huruf		99,81 %	99,83 %			√

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Interval (%)			
			Target	Realisasi	<55	55-70	70-85	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama	100 %	100 %				√
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni	100 %	100 %				√
		Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	100 %	100 %				√
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka usia harapan hidup	70,68 tahun	69,93 tahun				√
		Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Baik	Baik				√
		Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Baik	Baik				√
		Prevalensi balita gizi buruk	0,66	0,153				√
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%	100%				√
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,30	100%				√
6	1. Penguatan sumber daya manusia; 2. Penguatan IKM; 3. Pengembangan IKM; 4. Perbaikan produksi.	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri	22 Klpk	22 Klpk				√
7	Terwujudnya pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	102	50				√
8	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	10 OPD	10 OPD				√
		Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD	6 OPD	6 OPD				√
9	Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	65%	65%				√
10	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	6 Trayek	6 Trayek				√
		Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	82,59%	82,77%				√
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota	50%	50%				√
11	Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	1	1				√
12	Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro	4	4				√

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Interval (%)			
			Target	Realisasi	<55	55-70	70-85	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif	Persentase sampah yang terangkut	60%	60%				√
		Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	15 ton	15 ton				√
		Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	15%	15%				√
14	Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	51,54%	59,60%				√
		Panjang jalan yang terbangun (meter)	234.784	303.406				√
		Panjang drainase yang terbangun (meter)	42.104	42.476				√
		Persentase drainase kota dalam kondisi baik	43,86%	48,77%				√
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%	100%				√
		Akses Sanitasi layak	61,14%	61,14%				√
		Cakupan layanan pengguna air bersih	79,27%	81,55%				√
		Persentase kawasan kumuh yang tertata	17,61%	17,61%				√
		Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)	5 lokasi	5 lokasi				√
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial	Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	46	46				√
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	2	2				√
		Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	17	17				√

Sumber data : BPS Kota Palu dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

“Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS”

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis tersedianya sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS, *indikator kinerja* jumlah sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS, angka capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS disebabkan tersedianya sumberdaya pengguna IT disetiap perangkat daerah dan kelurahan, terlaksananya integrasi sinkronisasi potensi sumberdaya

Kota Palu berbasis GIS, tersedianya desain dan software sistem potensi sumberdaya daerah Kota Palu. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	1	1	100 %

Sasaran 2 :

” Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu “

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 dengan sasaran strategis tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu, indikator kinerja jumlah dokumen data potensi SDM dengan angka capaian kinerja sarasanya sebesar 100 % dan indikator kinerja jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS, angka capaian kinerja sarasanya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu disebabkan terlaksananya survey dan pemetaan potensi sumberdaya daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dan tersedianya sarana dan prasarana sistem jaringan disetiap perangkat daerah dan kelurahan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Data Dan Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen data potensi SDM	3 dokumen	3 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	4 dokumen	4 dokumen	100 %

Sasaran 3 :

” Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun, indikator kinerja Angka Putus Sekolah tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar) dengan angka capaian kinerja sarasanya

sebesar 85,71% dengan predikat **sangat berhasil** dan SMP sebesar 196,86% dengan predikat **sangat berhasil**.

Indikator kinerja Angka Melek Huruf dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,98% dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapaiannya sasaran strategis terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun pada indikator kinerja angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar tingkat SMP dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Kota Palu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 003/III/pemkot/2017 tentang Larangan Memungut Sumbangan Orang Tua Murid di Seluruh Sekolah Tingkat TK/Paud, SD, dan SMP. Dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan menuntaskan wajib belajar 9 Tahun.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar :			
	- SD	0,035	0,04	85,71%
	- SMP	0,32	0,01	196,86%
2	Angka Melek huruf	99,85	99,83	99,98%

Sasaran 4 :

” Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya “

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 dengan sasaran strategis terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya pada capaian indikator persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil**.

Capaian indikator persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil**. Sedangkan capaian indikator persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya dengan indikator persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama disebabkan adanya kebijakan pemerintah kota palu yang mewajibkan bagi siswa

kelas 5 SD untuk mengikuti pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha) di luar jam sekolah pada tingkat sekolah dasar.

Tercapainya sasaran strategis persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni disebabkan telah terbentuknya sanggar seni diseluruh Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu.

Tercapainya sasaran strategis persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kota Palu melalui Instruksi Wali Kota Palu Nomor 75/II/pemkot/2017 tentang Penggunaan Atribut Budaya di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Capaian Sasaran Strategis Terlaksananya Peningkatan Pendidikan Agama dan Budaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama	100%	100%	100%
2	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni	100%	100%	100%
3	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	75 %	75 %	100%

Sasaran 5 :

” Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja angka usia harapan hidup, angka capaian kinerjanya sebesar 98,94 % dengan predikat **sangat berhasil**. Untuk indikator kinerja Indeks pelayanan kesehatan puskesmas, angka capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja Indeks pelayanan kesehatan rumah sakit, angka capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja prevalensi balita gizi buruk, angka capaian kinerjanya sebesar 176,82 % dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja persentase penanggulangan kejadian luar biasa, angka capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja cakupan kelurahan siaga aktif, angka capaian kinerjanya sebesar 109,53 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja Indeks pelayanan kesehatan puskesmas disebabkan :

- Telah terciptanya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam melaksanakan dan memperbaiki kualitas mutu pelayanan di puskesmas
- Kualitas sumberdaya manusia tenaga kesehatan yang meningkat, melalui pelatihan-pelatihan teknis kesehatan.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja indeks pelayanan kesehatan rumah sakit disebabkan :

- Adanya pembenahan pada unsur waktu tunggu pelayanan melalui perubahan dalam penerimaan pasien di loket pendaftaran dengan menyediakan fasilitas mesin antrian kunjungan.
- Adanya pemilahan pasien lama dan pasien baru dan pengaturan atau penjadwalan/pembagian tugas kerja dokter spesialis di pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- Adanya pembenahan pada unsur kenyamanan ruangan dan keamanan ruangan melalui pengawasan yang ketat dari petugas keamanan dalam pemberlakuan jam besuk dan penjaga pasien maksimal 2 orang, selain itu anak usia dibawah 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke ruang perawatan sehingga suasana tenang dan nyaman dapat dirasakan pasien

Sejalan dengan tercapainya indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Tahun 2017 RSUD Anutapura mendapatkan Pengakuan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit bahwa RSUD Anutapura Palu mendapatkan Status Akreditasi dengan hasil kelulusan TINGKAT PARIPURNA berdasarkan Nomor Sertifikat KARS-SERT/987//2018 tanggal 8 Januari 2018.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja prevalensi balita gizi buruk disebabkan adanya kepedulian Pemerintah Kota Palu dalam upaya penanganan balita gizi buruk di wilayah Kota Palu.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan balita gizi buruk di Kota Palu antara lain:

- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk;
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan di Posyandu;
- Pemberian MP-ASI pada Balita Gakin usia (6– 12 bulan);
- Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk;
- Pendampingan keluarga Balita Kurang Gizi;
- *Teurapetic Feeding Center (TFC)*;
- *Community Feeding Center (CFC)*

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja persentase penanggulangan kejadian luar biasa disebabkan karena tidak adanya kasus penyakit yang berpotensi KLB dalam kurun waktu beberapa tahun. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan penanggulangan kelurahan yang mengalami KLB, meliputi:

- Pemantauan dan pelacakan KLB/Surveilans Epidemiologi;
- Pemantauan dan pelacakan Suspek KLB (Kejadian Luar Biasa);
- Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS);
- Pelaporan surveilans epidemiologi dan kematian;
- Penanggulangan bencana dan pasca bencana.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja cakupan kelurahan siaga aktif disebabkan adanya peran serta aktif masyarakat Kota Palu dalam program kesehatan, hal ini terlihat dari jumlah poskesdes di Kota Palu Tahun 2017 adalah 52 unit, baik yang berasal dari swadaya masyarakat maupun yang dibangun oleh pemerintah, dengan jumlah kader sebanyak 102 orang dan tokoh masyarakat 52 orang

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka usia harapan hidup	70,68 Tahun	69,93 Tahun	98,94%
2	Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	Baik	Baik	100%
3	Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Baik	Baik	100%
4	Prevelensi balita gizi buruk	0,66	0,153	176,82%
5	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%	100%	100%
6	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,30	100%	109,53%

Sasaran 6 :

” Penguatan sumber daya manusia; Penguatan IKM; Pengembangan IKM ; Perbaikan produksi.“

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis penguatan sumberdaya manusia; penguatan IKM; pengembangan IKM; perbaikan produksi, angka capaian kinerja sasarannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis penguatan sumberdaya manusia; penguatan IKM; pengembangan IKM; perbaikan produksi; pada indikator kinerja jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri disebabkan adanya bantuan peralatan dan mesin, pendampingan manajemen, kualitas produk dan pemagangan pengolaham batu alam di Magelang dan pemagangan kerajinan daun silar di Tasikmalaya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Capaian Sasaran Strategis Penguatan sumberdaya Manusia; Penguatan IKM; Pengembangan IKM; Perbaikan produksi.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri	22 Klpk	22 Klpk	100%

Sasaran 7 :

” Terwujudnya pengembangan usaha mikro “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis terwujudnya pengembangan usaha mikro, angka capaian kinerja sasarannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis terwujudnya pengembangan usaha mikro pada indikator kinerja jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri disebabkan Pemerintah Kota Palu telah melakukan peningkatan dan pengembangan usaha mikro bagi pelaku usaha baru.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Usaha Mikro

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	102	102	100%

Sasaran 8 :**” Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya, angka capaian kinerja sasarnya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD sebesar 100% dan capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya pada indikator kinerja jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD disebabkan adanya pembinaan dan pengembangan dalam penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar prosedur layanan pada 10 (sepuluh) OPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Anutapura, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu.

Tercapainya Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Berbasis Budaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	10 OPD	10 OPD	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat baik terhadap layanan OPD	6 OPD	6 OPD	100%

Sasaran 9 :

” Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif, angka capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil** dengan capaian indikator kinerja persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional sebesar 100% .

Tercapainya sasaran strategis terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsive pada indikator persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional disebabkan Pemerintah Kota Palu melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Pendamping Pembangunan Daerah Kota Palu telah melakukan rasionalisasi program, kegiatan, dan anggaran di Tahun 2017.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut .

Tabel 3.11

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Transparan, Akuntabel dan Responsif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	65%	65%	100%

Sasaran 10 :

” Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis **Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman** capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Pada capaian indikator kinerja **Jumlah lintasan trayek angkutan umum** dengan capaian sebesar 100%. Indikator kinerja **Ketersediaan Lokasi Lahan Parkir Yang Layak** dengan capaian 100,21%, dan Indikator Kinerja **Ketersediaan Pelayanan Terminal Kota** dengan capaian **100%**.

Tercapainya sasaran strategis terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman pada indikator kinerja **jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan**

disebabkan upaya Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan Kota Palu telah mewujudkan pelaksanaan trayek angkutan umum sebanyak 6 (enam) jaringan trayek sesuai dengan keputusan Wali Kota Palu Nomor 551.2/361/Dishub/2017 tentang jaringan trayek angkutan kota dan wilayah operasi angkutan serba guna serta tarif pelayanan angkutan dengan kendaraan umum dalam wilayah Kota Palu. Dalam keputusan Wali Kota ini menjelaskan mengenai jaringan trayek angkutan kota, wilayah operasi angkutan serba guna serta tarif pelayanan angkutan.

Tercapainya capaian sasaran strategis penataan transportasi yang aman dan nyaman dengan indikator kinerja **Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak** disebabkan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Palu dalam mengupayakan potensi lahan atau titik parkir sebanyak 446 lahan/titik menjadi 447 titik/lahan. Olehnya untuk tahun berikutnya Dinas Perhubungan Kota Palu akan menargetkan sebanyak 468 titik/lahan, yang menjadi potensi dari titik/lahan parkir yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota palu dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan yang di berikan oleh Pemerintah Kota Palu. Realisasi dari capaian indikator kinerja kedua ini mengacu pada Dinas Perhubungan Kota Palu mengenai lokasi lahan/titik parkir. Dengan rincian titik parkir tep jalan di Kecamatan Palu Selatan sebanyak 63 titik parkir, Kecamatan Palu Timur sebanyak 169 titik parkir, Kecamatan Palu Barat sebanyak 191 titik parkir, dan Kecamatan Palu Utara sebanyak 24 titik parkir.

Tercapainya sasaran strategis penataan transportasi yang aman dan nyaman dengan indikator kinerja **Ketersediaan Pelayanan Terminal Kota**, disebabkan upaya Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penataan terminal kota guna meningkatkan pelayanan terminal di laksanakan pada dua terminal yaitu Terminal Mamboro dan Terminal Petobo dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang layak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terminal yang ada di Kota Palu.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Penataan Transportasi yang Aman dan Nyaman

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	6	6	100%
2	Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	82,59%	82,77%	100,21%
3	Ketersediaan pelayanan terminal Kota	50%	50%	100%

Sasaran 11 :

” Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya, angka capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. capain indikator kinerja Ketersediaan kawasan publikasi kota sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis **Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya**, pada Indikator Kinerja Jumlah **sculpture berbasis nilai budaya dan sejarah** disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun dekorasi kota dalam bentuk ornament yang bercirikan budaya yaitu Taman GOR. Ornament tersebut mencerminkan nilai Toleransi, nilai kekeluargaan dan nilai gotongroyong.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, dapat terlihat dibawah ini :

Tabel 3.13

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Penataan Dekorasi Kota yang Tertib, Indah dan Memiliki Nilai Budaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	1	1	100%

Sasaran 12 :

” Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya, angka capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil** dengan capaian indikator kinerja Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis **Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya**, pada Indikator Kinerja Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun 4 (empat) ruang publik yaitu Kawasan Kampung Kaili, Taman GOR, Hutan Kota dan Taman Vatulemo.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut. Dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Ruang Publik Kota yang Berbasis Nilai Budaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro	4	4	100%

Sasaran 13 :

” Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif, angka capaian kinerja sasarnya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**, capaian indikator kinerja Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis **Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif**, pada indikator kinerja Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah menerapkan Manajemen Kue Lapis dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.

Tercapainya sasaran strategis **Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif**, pada indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membentuk Satgas K5 pada 46 Kelurahan di Kota Palu. Satgas K5 sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan di masing-masing Kelurahan dalam bentuk Gerakan Gali Gasa.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Kota yang Partisipatif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase sampah yang terangkut	60%	56,02%	93,37%
2	Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	15 ton	15 ton	100%
3	Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	15%	15%	100%

Sasaran 14:

” Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Dengan capaian Indikator Kinerja Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Panjang jalan yang terbangun (meter) capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja panjang drainase yang terbangun (meter) disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun Drainase jalan Kota sepanjang 42,476 meter. Indikator Kinerja persentase drainase kota dalam kondisi baik disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan drainase jalan Kota. Indikator Kinerja persentase drainase kota dalam kondisi baik capaian kinerja 100 %, Indikator Kinerja persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Akses Sanitasi layak capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Cakupan layanan pengguna air bersih capaian kinerja 100%, Indikator kinerja Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan air bersih capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Persentase kawasan kumuh yang tertata capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) capaian kinerja 100%.

Tercapainya sasaran strategis **Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan** pada indikator kinerja Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun, meningkatkan dan rehabilitasi jalan Kota dan jalan lingkungan sepanjang 303.406 KM. Untuk Indikator Kinerja Panjang jalan yang terbangun (meter) disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun jalan Kota dan Jalan lingkungan sepanjang 303.406 meter. Indikator Kinerja persentase drainase kota dalam kondisi baik disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah melakukan pemeliharaan drainase jalan Kota. Indikator Kinerja persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah melakukan pemeliharaan dan perawatan jembatan yang ada di Kota Palu. Indikator Kinerja Akses Sanitasi layak disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan sanitasi perkotaan (drainase, air limbah) pada lokasi Kawasan Lorong Bakso, Kelurahan Pantoloan Boya, dan Kelurahan Baiya. Indikator Kinerja Cakupan layanan pengguna air bersih disebabkan Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum telah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan Air Bersih dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Silae dan Kelurahan Buluri. Indikator Kinerja Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu

karang, hutan bakau) disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah melakukan Revitalisasi kawasan konsevasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) yang terletak di kelurahan Duyu, Kelurahan Tavanjuka Kelurahan Besusu Barat, dan Kelurahan Pantoloan Boya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pusat-pusat Wisata Berbasis Budaya dan Religi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	51,54%	59,60%	115%
2	Panjang jalan yang terbangun (meter)	234.784	303.406	129,23
3	panjang drainase yang terbangun (meter)	42.104	42.476	100,88%
4	persentase drainase kota dalam kondisi baik	43,86%	48,77	111,19
5	persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	100%
6	Akses Sanitasi layak	61,14%	61,14%	100%
7	Cakupan layanan pengguna air bersih	79,27	81,55%	102,88%
8	Persentase kawasan kumuh yang tertata	17,61%	17,61%	100%
9	Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)	5 lokasi	5 lokasi	100%

Sasaran 15:

” Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial angka capaian kinerja sasarnya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Capaian indikator Kinerja Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi Capaian indikator Kinerja sebesar 100%, capaian indikator kinerja persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi sebesar 100% dan Capaian Indikator Kinerja Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial pada indikator kinerja persentase lembaga adat berperan dan berfungsi disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membentuk Lembaga Adat di 46 kelurahan se-Kota Palu yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Peradilan Adat Kaili, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 20017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili, dan dilakukan pengukuhan Lembaga Adat oleh Wali Kota Palu di 46 (empat puluh enam) kelurahan se-Kota Palu.

Tercapainya sasaran strategis peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial pada indikator persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi disebabkan :

- Terlaksananya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan social kemasyarakatan dengan mendorong peran pemberdayaan masyarakat
- Mendorong kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

Tercapainya sasaran strategis peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial pada indikator Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi disebabkan :

- Melibatkan lembaga seni budaya dalam pergelaran budaya di Festival Pesona Palu Nomoni.
- Adanya bantuan sarana dan prasarana bagi lembaga seni budaya berupa gimba, lalove, kakula,

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Nilai-nilai Toleransi, Kekeluargaan dan Kegotong-royongan dalam Menjaga Keserasian Sosial

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	46	46	100%
2	Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	2	2	100%
3	Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	17	17	100%

3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

Gambaran perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017, menunjukkan tidak adanya perbedaan nilai capaian target. Rata-rata nilai capaian target kinerja Tahun 2016 sebesar 100%, dan nilai capaian target kinerja Tahun 2017, rata-rata sebesar 100%. Artinya bahwa nilai capaian target kinerja Tahun 2016 di banding dengan nilai capaian target kinerja Tahun 2017 adalah sama, rincian perbandingan nilai capaian target kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017 di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	% Capaian Target 2016	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Target 2017	
1	Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	0	0%	1	100%	
2	Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu	Jumlah dokumen data potensi SDM	0	0%	3 Dok	100%	
		Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	0	0%	4 Dok	100%	
3	Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD	0,01	0,04	0,04	85,71%
			SMP	0,3	0,01	0,01	196,86%
		Angka Melek huruf	99,81	100%	99,83 %	99,98%	
4	Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama	0	0%	100 %	100%	
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni	0	0%	100 %	100%	
		Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	0	0%	100 %	100%	
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,93 tahun	99,39	69,93 tahun	98,94	
		Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Baik	Baik	Baik	Baik	
		Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Baik	Baik	Baik	Baik	
		Prevalensi balita gizi buruk	0,157	177,57	0,153	176,82	
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%	100	100%	100	
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%	112,20	100%	109,53	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	% Capaian Target 2016	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Target 2017
6	1. Penguatan sumber daya manusia.;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi.	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri	22 Klpk	100%	22 Klpk	100%
7	Terwujudnya pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	0	0%	102	100%
8	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	7 OPD	100%	10 OPD	100%
		Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD	6 OPD	100%	6 OPD	100%
9	Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	35%	100%	65%	100%
10	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	0	0%	6 Trayek	100%
		Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	61,48%	100%	82,77%	100,21%
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota	25%	100%	50%	100%
11	Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	0	0%	1	100%
12	Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro	1	100%	4	100%
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif	Persentase sampah yang terangkut	55%	100%	56,02%	93,37%
		Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	12 Ton	100%	15 ton	100%
		Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	0	0%	15%	100%
14	Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	44,81%	100%	59,60%	115%
		Panjang jalan yang terbangun	171.858 meter	100%	303.406	129,23%
		Panjang drainase yang terbangun (meter)	14.160 meter	100%	42.476	100,88%
		Persentase drainase kota dalam kondisi baik	40,57 %	100%	48,77%	111,19%
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%
		Akses sanitasi layak	61%	100%	61,14%	100%
		Cakupan layanan	79,01%	100%	81,55%	102,88%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	% Capaian Target 2016	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Target 2017
		pengguna air bersih				
		Persentase kawasan kumuh yang tertata	0	0%	17,61%	100%
		Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)	5 Lokasi	100%	5 lokasi	100%
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial	Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	0	0%	46	100%
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	0	0%	2	100%
		Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	0	0%	17	100%

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target RPJMD Tahun 2017

Target Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021, dibandingkan dengan Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun 2017 rata-rata telah terealisasi 100 %, dengan rincian digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMD 2016 – 2021

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2017	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017	% Capaian target	Rumus	
1	Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	1	1	100%	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	
2	Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu	Jumlah dokumen data potensi SDM	3 Dok	3 Dok	100%	Jumlah dokumen data potensi SDM	
		Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	3 Dok	4 Dok	100%	Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	
3	Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD	0,035	0,04	85,71%	Jumlah capaian Kinerja APS SD/MI se-Kota Palu dibagi Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kota Palu dikali 100 %
			SMP	0,32	0,01	196,86%	Jumlah capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kota Palu dibagi Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kota Palu dikali 100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2017	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017	% Capaian target	Rumus
		Angka Melek huruf	99,85%	99,83 %	99,98%	Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun 2017 dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100
4	Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama	100%	100 %	100%	Jumlah siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama dibagi jumlah siswa kelas 5 se-Kota Palu dikali 100%
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni	100%	100 %	100%	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni dibagi jumlah Sekolah Menengah Pertama
		Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	75 %	100 %	100%	Jumlah sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya dibagi jumlah sekolah pendidikan dasar dikali 100%
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka usia harapan hidup	70,68 tahun	69,93 tahun	98,94	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
		Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Baik	Baik	Baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25
		Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit :	Baik	Baik	Baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25
		Prevalensi balita gizi buruk	0,66	0,153	176,82	(Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi) / (Jumlah Balita ditimbang) * 100
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%	100%	100	(Jumlah KLB yang ditangani) / (Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama) * 100
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,30	100%	109,53	(Jumlah Kelurahan siaga yang aktif) dibagi (jumlah Kelurahan siaga) * 100
6	1. Penguatan sumber daya manusia.;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi.	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri	22 Klpk	22 Klpk	100%	Jumlah data kelompok IKM
7	Terwujudnya pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	102	102	100%	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2017	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017	% Capaian target	Rumus
8	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	10 OPD	10 OPD	100%	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD
		Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD	6 OPD	6 OPD	100%	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik terhadap layanan OPD
9	Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	65%	65%	100%	Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD dikali 100 %
10	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	6 Trayek	6 Trayek	100%	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan
		Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	82,59%	82,77%	100,21%	Jumlah lokasi lahan parkir yang layak dibagi jumlah lahan parkir kota dikali 100%
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota	50%	50%	100%	Jumlah terminal kota yang dikelola dibagi jumlah terminal kota
11	Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	1	1	100%	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah
12	Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro	4	4	100%	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif	Persentase sampah yang terangkut	60%	56,02%	93,37%	Jumlah sampah yang terangkut dibagi jumlah sampah yang ada dikali 100 %
		Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	15 ton	15 ton	100%	Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat
		Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	15%	15%	100%	Jumlah kelurahan yang menjaga kebersihan lingkungan dibagi jumlah kelurahan Kota Palu dikali 100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2017	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017	% Capaian target	Rumus
14	Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	51,54%	59,60%	115%	Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan Kota Palu dikali 100 %
		Panjang jalan yang terbangun (meter)	234.784	303.406	129,23%	Panjang jalan yang terbangun (meter)
		Panjang drainase yang terbangun (meter)	42.104	42.476	100,88%	Panjang drainase yang terbangun (meter)
		Persentase drainase kota dalam kondisi baik	43,86%	48,77%	111,19%	Panjang drainase terbangun dalam kondisi baik dibagi panjang drainase Kota Palu yang mesti terbangun dikali 100%
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	100%	Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan yang terbangun dikali 100%
		Akses sanitasi layak	61,14%	61,14%	100%	Akses sanitasi layak
		Cakupan layanan pengguna air bersih	79,27	81,55%	102,88%	Jumlah layanan pengguna air bersih dibagi jumlah penduduk dikali 100 %
		Persentase kawasan kumuh yang tertata	17,61%	17,61%	100%	Jumlah kawasan kumuh yang tertata dibagi jumlah kawasan kumuh di Kota Palu
		Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)	5 lokasi	5 lokasi	100%	Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial	Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	46	46	100%	Jumlah lembaga adat yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga adat Kota Palu
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	2	2	100%	Jumlah lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga keagamaan Kota Palu
		Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	17	17	100%	Jumlah lembaga seni yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga seni Kota Palu

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.6 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta solusinya.

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 sesuai target dalam RPJMD Tahun 2016-2021 rata-rata tercapai 100%. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak sesuai target RPJMD 2016-2021 yaitu:

1. Indikator kinerja angka usia harapan hidup yang hanya mencapai 69,93 tahun dari target 70,68 tahun. Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat (PHBS)
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap Lansia

Solusi:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat melalui program Gerakan Masyarakat (GERMAS) terintegrasi
 - b. Mengoptimalkan pembinaan lansia oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
2. Indikator kinerja angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar tingkat SD tidak tercapai disebabkan masih adanya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan dasar.

Solusinya Kepada Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi pemahaman masyarakat kurang mampu terhadap pentingnya pendidikan dasar.

3. Indikator kinerja persentase sampah yang terangkut yang hanya mencapai 56,02% dari target 60%. Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan :

- a. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah
- b. Belum optimalnya pengolahan timbulan sampah oleh masyarakat.

Solusi :

- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengolahan sampah melalui “Perang Melawan Sampah Palu Bebas Sampah”.
- b. Penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi (denda) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengolahan timbulan sampah.

3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2017 dengan realisasi anggaran Tahun 2017. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran Pemerintah Kota

Palu yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang diinginkan Tahun 2017. Rincian realisasi penggunaan anggaran Tahun 2017 dengan realisasi capaian target kinerja Tahun 2017 pada table berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2017 dengan Realisasi Capain Target Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian target	Target Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi Anggaran 2017 (Rp)	Persentase (%)	
1	Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS	Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS	1	1	100%	4.195.635.331	3.669.341.731	87,46	
2	Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu	Jumlah dokumen data potensi SDM	3 Dok	3 Dok	100%				
		Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	4 Dok	4 Dok	100%				
3	Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD	0,35%	0,04	85,71%	21.233.795.200	20.699.475.251	97,48
			SMP	0,32%	0,01	196,86%			
		Angka Melek huruf	99,81%	99,83%	99,98%				
4	Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama	100%	100%	100%	44.825.182.200	44.259.851.700	98,74	
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni	100%	100%	100%				
		Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	100%	100%	100%				
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka usia harapan hidup	70,68 tahun	69,93 tahun	98,94	23.311.049.913	22.608.804.483	96,99	
		Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Baik	Baik	Baik				
		Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Baik	Baik	Baik	173.817.308.335	159.849.351.576	91,96	
		Prevalensi balita gizi buruk	0,66	0,153	176,82	66.746.000	66.746.000	100	
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%	100%	100%	913.685.900	911.843.500	99,8	
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,3	100%	109,53	1.243.347.500	1.242.397.500	99,92	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian target	Target Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi Anggaran 2017 (Rp)	Persentase (%)
6	1.Penguatan sumber daya manusia;2.Penguatan IKM;3.Pengembangan IKM;4.Perbaikan produksi;	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri	22 Klpk	22 Klpk	100%	715.355.500	639.475.900	89,39
7	Terwujudnya pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	102	102	100%	252.143.000	251.125.000	99,6
8	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	10 OPD	10 OPD	100%	106.403.550	99.359.450	93,38
		Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD	6 OPD	6 OPD	100%	45.600.000	45.600.000	100
9	Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	65%	65%	100%	2.356.689.000	2.294.047.012	97,34
10	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	6 Trayek	6 Trayek	100%	129.688.000	129.688.000	100
		Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	82,59%	82,77%	100%	835.095.000	822.368.500	98,48
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota	50%	50%	100%	123.935.000	117.772.000	95,03
11	Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	1	1	100%	4.063.062.475	3.968.841.526	97,68
12	Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro	4	4	100%	820.189.900	817.327.400	99,65
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif	Persentase sampah yang terangkut	60%	60%	100%	9.893.928.059	8.792.928.455	88,87
		Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	15 ton	15 ton	100%			
		Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	15%	15%	100%			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian target	Target Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi Anggaran 2017 (Rp)	Persentase (%)
14	Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	51,54%	59,60%	115%	143.637.781.218	138.471.119.149	96,4
		Panjang jalan yang terbangun (meter)	234.784	303.406	129,23%			
		Panjang drainase yang terbangun (meter)	42.104	41.476	98,51%			
		Persentase drainase kota dalam kondisi baik	43,86%	48,77%	111,19%			
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	100%			
		Akses Sanitasi layak	61,14%	61,14%	100%	3.456.317.000	2.572.914.000	74,44
		Cakupan layanan pengguna air bersih	79,27%	81,55%	102,88%	11.517.161.000	11.315.447.514	98,25
		Persentase kawasan kumuh yang tertata	17,61%	17,61%	100%	3.320.681.000	2.726.272.300	82,1
		Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)	5 lokasi	5 lokasi	100%	444.028.900	440.939.600	99,3
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial	Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	46	46	100%	3.161.368.800	3.098.868.800	98,02
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	2	2	100%			
		Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	17	17	100%	211.645.000	153.145.000	72,36

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.8 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2017

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016–2021 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;

3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi belanja dengan pendekatan Rasionalitas, Realitas dan Proporsional;
4. Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.340.906.455.717,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :

Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.1.298.042.428.903,00 setelah perubahan sebesar Rp.1.340.906.455.717,20 (bertambah menjadi Rp.42.864.026.814,20).

2. Belanja :

Belanja sebelum perubahan sebesar Rp.1.277.791.822.503,00, setelah perubahan menjadi Rp.1.342.484.148.799,58 (bertambah Rp.64.692.326.296,58).

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp.9.746.393.600,- setelah perubahan sebesar Rp. 32.544.874.571,38. (bertambah Rp. 22.798.480.971,38).

b. Pengeluaran

Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp.29.997.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.30.967.181.489. bertambah (Rp.970.181.489).

3.9 Pendapatan

Berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2016 – 2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada tiga pendekatan yaitu rasional, realistis dan proporsional serta mendapat dukungan dari masyarakat. Pada Tahun 2017 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp.2.567.626.572.129,00. Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.21Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2017
Per 31 Desember 2017

URAIAN	TARGET 2017	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PAD	283.967.304.727	284.377.595.883	100,14
Perimbangan	941.175.118.602	928.017.146.208	98,60
Pendapatan Lain-lain yang Sah	115.764.032.388,20	88.364.310.748	76,33
Total	1.340.906.455.717,20	1.300.759.052.839,00	97,01

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2017

Tabel 3.17 menjelaskan bahwa PAD melebihi target dari Rp. 283.967.304.727 dan terealisasi sebesar Rp. 284.377.595.883 naik sebesar Rp. 410.291.156 atau mencapai 100,14 %. Kontribusi kenaikan PAD diperoleh dari pendapatan lain-lain BLUD sebesar Rp. 14.347.181.937.

Realisasi dana perimbangan Tahun 2017 sebesar Rp. 928.017.146.208 atau mencapai 98,60 % dari target yang direncanakan. Demikian halnya realisasi pendapatan lain-lain yang sah terealisasi sebesar Rp.88.364.310.748 turun sebesar Rp.27.399.721.640,20.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 21,86% dari total pendapatan Kota Palu di tahun 2017. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 71,34% dan sisanya sebesar 6,79% adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin besar kontribusi PAD atas pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar.

3.10 Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan pendekatan rasional, realistis dan proporsional untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan dalam RPJMD. Kebijakan belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam tabel 3.18.

Tabel 3.22

Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN 2017 SETELAH		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak	582.913.812.491,58	535.864.560.395	91,93
2	Belanja Langsung	759.570.336.308	669.535.887.834	88,15
Total Belanja		1.342.484.148.799,58	1.205.400.448.229	90,04

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2017

Berdasarkan tabel 3.18 di atas menjelaskan bahwa belanja tahun 2017 sebesar Rp.1.342.484.148.799,58 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.582.913.812.491,58 (43,42%) dan belanja langsung sebesar Rp.759.570.336.308 (56,58%), sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.1.205.400.448.229 (91,93) yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 535.864.560.395 dan belanja langsung sebesar Rp.669.535.887.834 (88,15) dengan rata-rata belanja sebesar 90,04%.

3.11 Pembiayaan

Pembiayaan pada struktur APBD Tahun Anggaran 2017 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palu senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Palu khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada masyarakat.

Berkenaan dengan kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Palu, maka komponen pembiayaan penggunaannya diarahkan untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kota Palu yang telah jatuh tempo pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.19.

Tabel 3.23

Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	32.544.874.571,38	32.536.677.560,38	99,97
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30.967.181.489,00	30.957.681.489,00	99,97

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2017

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2017 yang ditargetkan sebesar Rp.32.544.874.571,38 terealisasi sebesar Rp.32.536.677.560,38 atau 99,97% dan pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp.30.967.181.489,00 terealisasi sebesar Rp.30.957.681.489,00 atau 99,97%. Berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut sehingga didapatkan pembiayaan netto sebesar Rp. 1.578.996.071,38 atau 95,15%.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian dari 15 (lima belas) sasaran strategis yang mencakup 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja, dikategorikan sangat berhasil. Selanjutnya, rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 105,67 % atau bermakna sangat berhasil. Dengan demikian capaian kinerja Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Beberapa langkah antisipatif yang telah dan sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 merupakan bagian dari upaya mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran strategis, sebagaimana yang telah dijanjikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik di setiap kecamatan;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas;
4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan
5. Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata;
6. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya;
7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan;
8. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik;
9. meningkatkan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya;
10. meningkatkan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu;
11. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2017, disusun untuk dijadikan bahan evaluasi dan penilaian kinerja Pemerintah Kota Palu ke depan. Dengan penyampaian laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja yang akan datang.